

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Stunting merupakan salah satu masalah gizi kronis yang menjadi tantangan serius bagi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia dan dunia. Kondisi ini terjadi akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama, yang menyebabkan gagal tumbuh pada anak balita dan berimplikasi pada terhambatnya perkembangan kognitif. Secara global, Indonesia merupakan salah satu negara dengan beban stunting yang tinggi. Wilayah Asia Tenggara bahkan memiliki prevalensi stunting yang mencapai 30% dan merupakan urutan kedua tertinggi di dunia setelah Afrika, dengan negara seperti Timor Leste menempati posisi teratas di kawasan Asia Tenggara (WHO, 2023).

Pemerintah Indonesia telah menjadikan percepatan penurunan stunting sebagai program prioritas nasional untuk menciptakan generasi emas 2045. Upaya ini menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di tingkat nasional telah turun menjadi 19,8% (Kementerian Kesehatan RI). Meskipun terjadi penurunan, angka ini masih memerlukan perhatian serius karena belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah, yaitu 14% pada tahun 2024. Menanggapi masalah ini, Pemerintah telah menerbitkan

berbagai regulasi, salah satunya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Hal ini menunjukkan bahwa fokus penanganan stunting tidak hanya pada aspek gizi, tetapi juga pada aspek implementasi kebijakan yang terintegrasi di tingkat daerah. Dalam konteks stunting, implementasi kebijakan di tingkat desa menjadi krusial karena merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dan pencegahan gizi sensitif.

Meskipun kerangka kebijakan sudah kuat, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan penelitian terdahulu dari Rivaldo Kogoya (2022) mengenai implementasi kebijakan penanganan stunting di Kecamatan Tagime, Kabupaten Jayawijaya, menemukan bahwa meskipun faktor komunikasi dan struktur birokrasi sudah berjalan baik, pelaksanaannya belum terlaksana secara optimal. Faktor penghambat utama adalah kurangnya sumber daya kesehatan dan fasilitas, serta masih banyak masyarakat yang belum menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) akibat kurangnya pengetahuan dari ibu hamil. Penelitian Wididiati, *et al.*, (2022) di Kabupaten Lombok Timur juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilakukan, namun angka stunting masih cukup tinggi dan penurunan jumlah balita stunting tidak signifikan. Kesenjangan terjadi pada faktor kapasitas dan kualitas kader posyandu yang kurang baik dalam memahami tugasnya (misalnya, melewatkan kunjungan rumah), serta partisipasi masyarakat yang rendah dalam menerima informasi kebijakan.

Berdasarkan wawancara sederhana yang dilakukan penulis dengan salah satu kader posyandu di desa Tewah Pupuh Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito

Timur (17 Oktober 2025, pukul 18.00 Wib), dikatakan bahwa program pencegahan stunting sudah dilaksanakan, termasuk kegiatan rutin posyandu dan penyuluhan. Namun, data pada anak stunting lambat dalam mengalami penurunan.

Penelitian terdahulu secara umum menunjukkan bahwa kendala implementasi seringkali terletak pada faktor Sumber Daya (SDM, fasilitas), Komunikasi (kualitas kader dan partisipasi masyarakat), dan Disposisi (perilaku hidup bersih) di tingkat pelaksana dan sasaran. Namun, penelitian-penelitian tersebut dilakukan di wilayah dengan karakteristik geografis, sosial, dan administratif yang berbeda (misalnya, di Lombok Timur dan Jayawijaya). Oleh karena itu, masih terdapat keterbatasan dalam menjelaskan secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan tersebut berinteraksi dan memengaruhi efektivitas Program Pencegahan Stunting dalam konteks lokal yang spesifik, seperti di Desa Tewah Pupuh, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah.

Fokus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor implementasi kebijakan yang menjadi penyebab belum optimalnya penurunan angka stunting. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi Pemerintah Kabupaten Barito Timur, khususnya di Desa Tewah Pupuh.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Implementasi program pencegahan stunting di desa Tewah Pupuh Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur?

C. Tujuan

Untuk mengetahui serta menganalisis implementasi program pencegahan stunting di desa Tewah Pupuh Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Menambah referensi di bidang Ilmu Administrasi Publik mengenai implementasi kebijakan (Program Pencegahan Stunting). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana faktor-faktor implementasi kebijakan beroperasi di tingkat desa, khususnya di Desa Tewah Pupuh.
2. Manfaat Praktis: Menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Tewah Pupuh dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program pencegahan stunting, dengan mengidentifikasi dan mengatasi masalah utama yang menyebabkan lambatnya penurunan angka stunting di Desa Tewah Pupuh.